

STRATEGI OPTIMALISASI ANGGARAN PERTAHANAN DI TENGAH KETERBATASAN APBN INDONESIA: PENDEKATAN MULTI-DIMENSI UNTUK PENCAPAIAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE

Fakhriyan Ardyanto^{1*}, Suyono Thamrin², Rudy Laksmono³

^{1,2,3}Department of Energy Resilience, Faculty of Defense Management,
The Republic of Indonesia Defense University, Indonesia

Corresponding e-mail: fakhriyanardyanto@mp.idu.ac.id

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: 10.53866/jimi.v5i5.1026

Abstract

This study analyzes Indonesia's defense budget optimization strategies in dealing with APBN fiscal constraints to achieve the Minimum Essential Force (MEF) target. Using a qualitative approach through desk research and secondary data analysis for the 2020-2025 period, the research identifies structural challenges in defense budget allocation, which remains below the international standard of 1.5-2% of GDP. The results show that MEF achievement, currently only at 65.06%, is affected by an imbalance in expenditure composition, with 51% allocated for personnel spending and only 40% for modernization of defense equipment. The increasingly complex global geopolitical dynamics, ranging from the Russia-Ukraine conflict to the escalation of tensions in the South China Sea, demand Indonesia to strengthen its defense capabilities despite fiscal limitations. The recommended optimization strategies include: (1) restructuring expenditure composition with a 60:40 ratio for investment versus operational spending; (2) implementing reserve components to reduce personnel costs; (3) strengthening the domestic defense industry through technology transfer; and (4) applying the smart defense concept with regional cost-sharing. Policy implications indicate that by consistently implementing these strategies, Indonesia can achieve a strong defense posture without overburdening national fiscal conditions while also stimulating economic growth through a multiplier effect of the domestic defense industry of 1.5-2 times the initial investment. This research contributes to the development of defense economics theory by integrating principles of efficient resource allocation in the context of developing country limitations.

Keywords: defense budget, minimum essential force, optimization, fiscal constraints, defense industry, defense economics, Indonesia state budget, smart defense

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi optimalisasi anggaran pertahanan Indonesia dalam menghadapi keterbatasan fiskal APBN untuk mencapai target Minimum Essential Force (MEF). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desk research dan analisis data sekunder periode 2020-2025, penelitian ini mengidentifikasi tantangan struktural dalam alokasi anggaran pertahanan yang masih di bawah standar internasional 1,5-2% PDB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian MEF yang saat ini hanya 65,06% dipengaruhi oleh ketidakseimbangan komposisi belanja dimana 51% dialokasikan untuk belanja pegawai dan hanya 40% untuk modernisasi alutsista. Dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, mulai dari konflik Rusia-Ukraina hingga eskalasi ketegangan di Laut China Selatan, menuntut Indonesia untuk memperkuat kapabilitas pertahanan meskipun dalam keterbatasan fiskal. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan meliputi: (1) restrukturisasi komposisi belanja dengan rasio 60:40 untuk investasi versus operasional; (2) implementasi komponen cadangan untuk mengurangi biaya personel; (3) penguatan industri pertahanan domestik melalui transfer teknologi; dan (4) penerapan konsep smart defense dengan cost-sharing

regional. Implikasi kebijakan menunjukkan bahwa dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, Indonesia dapat mencapai postur pertahanan yang kuat tanpa membebani kondisi fiskal negara sambil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui multiplier effect industri pertahanan domestik sebesar 1,5-2 kali lipat dari investasi awal. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori ekonomi pertahanan dengan mengintegrasikan prinsip efisiensi alokasi sumber daya dalam konteks keterbatasan fiskal negara berkembang.

Kata Kunci: anggaran pertahanan, minimum essential force, optimalisasi, keterbatasan fiskal, industri pertahanan, ekonomi pertahanan, APBN Indonesia, smart defense

1. Pendahuluan

Optimalisasi anggaran pertahanan dalam kondisi keterbatasan fiskal merupakan tantangan strategis yang dihadapi hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Dengan dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, mulai dari konflik Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, hingga eskalasi ketegangan di Laut China Selatan, mendorong negara-negara untuk meningkatkan anggaran pertahanan guna memperkuat kapabilitas militernya (The Global Review, 2025). Indonesia saat ini mengalokasikan anggaran pertahanan sekitar 0,77-1,0% dari PDB, masih berada di bawah standar internasional dimana negara-negara NATO menaikkan target anggaran pertahanan dari 2% menjadi 5% dari PDB, sementara negara tetangga seperti Singapura mengalokasikan 3% dari PDB untuk pertahanan (CNBC Indonesia, 2025).

Anggaran pertahanan Indonesia pada APBN 2025 mencapai Rp245,2 triliun (realisasi proyeksi), melonjak 47,6% dari target awal Rp166,1 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Kenaikan signifikan ini mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam memperkuat postur pertahanan, namun juga menimbulkan tantangan alokasi anggaran di sektor lain yang tidak kalah penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pencapaian Minimum Essential Force (MEF) yang saat ini baru mencapai 65,06% dari target 100% pada tahun 2024 menunjukkan perlunya strategi optimalisasi yang lebih efektif dalam pengelolaan anggaran pertahanan (CNBC Indonesia, 2024; InfoPublik, 2024).

Perbandingan dengan negara ASEAN menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki anggaran pertahanan terbesar kedua setelah Singapura (USD 9,3 miliar), namun jika dihitung per kapita dan rasio terhadap GDP, Indonesia masih tertinggal (Stockholm International Peace Research Institute, 2024). Singapura dengan anggaran USD 11,56 miliar dan personel aktif hanya 60.000 orang menunjukkan efisiensi yang tinggi dibandingkan Indonesia dengan anggaran USD 9,3 miliar untuk 400.000 personel aktif. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap struktur dan alokasi anggaran pertahanan Indonesia (Alif & Jafar, 2024).

Komposisi anggaran pertahanan yang tidak optimal menjadi hambatan utama dalam pencapaian MEF. Data menunjukkan bahwa 51% anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai dan dukungan manajemen, sementara hanya 40% untuk modernisasi dan pengadaan alutsista (Badan Keahlian DPR RI, 2020). Ketidakseimbangan ini tidak hanya menghambat pencapaian target MEF, tetapi juga mengurangi efektivitas investasi pertahanan dalam jangka panjang (Avisha et al., 2023).

Tantangan lain yang dihadapi adalah ketergantungan tinggi terhadap impor alutsista yang menguras devisa dan menimbulkan risiko embargo. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya industri pertahanan domestik yang belum mampu memenuhi kebutuhan alutsista secara mandiri (Farhan et al., 2023; Rohmad & Susilo, 2022). Di sisi lain, terdapat peluang strategis melalui pengembangan industri pertahanan domestik yang dapat memberikan dampak ganda: penghematan devisa dan peningkatan kemampuan teknologi dalam negeri (Montratama, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi dan struktur anggaran pertahanan Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam optimalisasi anggaran pertahanan, serta merumuskan strategi optimalisasi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai postur pertahanan yang ideal tanpa membebani kondisi fiskal negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode desk research atau studi literatur. Desk research merupakan penelitian yang didasarkan pada materi atau teori yang telah diterbitkan dalam sebuah laporan dan dokumen serupa yang tersedia di perpustakaan, situs web, data hasil survey, dan sumber

sekunder lainnya (Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2019). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap data sekunder yang tersedia dan memberikan pemahaman komprehensif mengenai fenomena optimalisasi anggaran pertahanan dalam konteks keterbatasan fiskal.

2.1. *Objek, waktu dan Tempat*

Objek penelitian ini adalah kebijakan anggaran pertahanan Indonesia dan implementasinya dalam pencapaian Minimum Essential Force (MEF). Fokus kajian meliputi struktur alokasi anggaran pertahanan, komposisi belanja pertahanan, capaian MEF, dan perbandingan dengan negara-negara regional ASEAN.

Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan, dari April hingga September 2025, dengan menggunakan data sekunder periode 2020-2025. Pemilihan periode ini didasarkan pada ketersediaan data yang lengkap dan relevansi dengan kondisi terkini geopolitik regional dan global yang mempengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia.

Tempat penelitian tidak terikat pada lokasi geografis tertentu karena menggunakan metode desk research. Pengumpulan data dilakukan melalui akses terhadap database online, perpustakaan digital, dan publikasi resmi institusi pemerintah serta lembaga penelitian yang kredibel.

2.2. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah terverifikasi kredibilitasnya, meliputi:

1. Dokumen Resmi Pemerintah: Laporan APBN Indonesia dari Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN, laporan realisasi anggaran pertahanan dari Kementerian Pertahanan, dan dokumen kebijakan pertahanan nasional.
2. Database Internasional: Data anggaran pertahanan dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF) untuk perbandingan regional dan internasional.
3. Publikasi Akademik: Jurnal ilmiah bereputasi, penelitian dari lembaga think tank, dan laporan penelitian dari universitas yang fokus pada kajian pertahanan dan ekonomi pertahanan.
4. Media dan Publikasi Institusional: Laporan dari lembaga seperti DPR RI, Kemenko Polhukam, dan publikasi media yang kredibel untuk data pendukung dan konteks kebijakan.

Kriteria pemilihan sumber data meliputi kredibilitas institusi penerbit, relevansi temporal (periode 2020-2025), kelengkapan data yang diperlukan, dan kesesuaian dengan fokus penelitian optimalisasi anggaran pertahanan Indonesia.

2.3. *Teknik Analisis Data*

Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Teknik analisis data meliputi:

1. Analisis Tren dan Komparatif: Analisis terhadap perkembangan anggaran pertahanan Indonesia periode 2020-2025 menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan tren. Perbandingan dengan negara ASEAN dilakukan untuk benchmarking dan pembelajaran best practices.
2. Analisis Komposisi dan Struktur: Dekonstruksi struktur anggaran pertahanan untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan alokasi antara belanja rutin dan belanja modal, serta dampaknya terhadap pencapaian MEF.
3. Sintesis Literatur: Integrasi berbagai sumber literatur untuk membangun kerangka teoretis ekonomi pertahanan yang relevan dengan konteks Indonesia, termasuk teori barang publik dan multiplier effect dalam investasi pertahanan.
4. Analisis Kebijakan: Evaluasi efektivitas kebijakan anggaran pertahanan existing dan formulasi rekomendasi strategis berdasarkan temuan empiris dan pembelajaran dari pengalaman negara lain.
5. Validasi Data: Cross-checking data antar sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi, serta identifikasi keterbatasan data yang dapat mempengaruhi kesimpulan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Hasil analisis menunjukkan bahwa anggaran pertahanan Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari Rp131,18 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp166,3 triliun pada tahun 2025 (pagu APBN) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Namun, realisasi anggaran konsisten melebihi pagu yang ditetapkan, dengan puncaknya pada tahun 2025 mencapai Rp245,2 triliun atau 147,7% dari pagu awal. Proporsi anggaran pertahanan terhadap PDB meningkat dari 0,73% pada tahun 2020 menjadi 1,0% pada tahun 2025.

Temuan ini mengindikasikan dua hal penting: pertama, kebutuhan riil pertahanan Indonesia lebih besar dari proyeksi perencanaan; kedua, terjadi peningkatan komitmen pemerintah terhadap penguatan postur pertahanan (Putra et al., 2025). Meskipun demikian, proporsi 1,0% PDB masih berada di bawah standar internasional 1,5-2% PDB untuk negara dengan kompleksitas ancaman seperti Indonesia (CNBC Indonesia, 2025).

Perbandingan dengan negara ASEAN mengungkap disparitas efisiensi yang signifikan (Stockholm International Peace Research Institute, 2024). Indonesia dengan anggaran USD 9,3 miliar untuk 400.000 personel aktif menghasilkan rasio USD 23.250 per personel. Sementara Singapura dengan USD 11,56 miliar untuk 60.000 personel mencapai USD 192.667 per personel, dan Malaysia dengan USD 3,79 miliar untuk 115.000 personel mencapai USD 32.956 per personel.

Data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki rasio personel terhadap anggaran yang kurang efisien dibandingkan tetangga regional (Alif & Jafar, 2024). Vietnam dengan rasio USD 13.191 per personel menunjukkan model yang lebih fokus pada kuantitas, sementara Singapura dan Malaysia lebih menekankan kualitas dan teknologi.

Analisis struktur belanja pertahanan Indonesia mengungkap ketidakseimbangan kritis: 51% dialokasikan untuk belanja pegawai dan dukungan manajemen, 40% untuk modernisasi alutsista, dan 9% untuk pemeliharaan (Badan Keahlian DPR RI, 2020). Struktur ini berkontribusi terhadap capaian MEF yang hanya mencapai 65,06% dari target 100% pada tahun 2024 (CNBC Indonesia, 2024; Detik News, 2024).

Benchmarking internasional menunjukkan bahwa negara dengan postur pertahanan efektif umumnya mengalokasikan 30-35% untuk belanja personel dan 60-65% untuk investasi dan modernisasi (Syntax Literate, 2023). Ketidakseimbangan struktur belanja Indonesia menjadi hambatan struktural utama dalam pencapaian MEF yang optimal (Wardhana & Soediantono, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan ketergantungan impor alutsista mencapai 70-80% dari total kebutuhan, yang menguras devisa dan menciptakan kerentanan strategis (Farhan et al., 2023). Industri pertahanan domestik yang diwakili PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT Pindad belum mencapai kapasitas optimal untuk memenuhi kebutuhan domestik secara mandiri (Rohmad & Susilo, 2022).

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya ekosistem riset dan pengembangan teknologi militer, dimana alokasi R&D hanya sekitar 2% dari total anggaran pertahanan, jauh di bawah standar internasional 5-8% untuk negara yang ingin mengembangkan industri pertahanan mandiri (Montratama, 2014).

3.2. Pembahasan

Ketidakseimbangan struktur belanja dengan dominasi belanja personel (51%) menunjukkan paradigma pertahanan yang masih berfokus pada aspek kuantitatif rather than kualitatif (Avisa et al., 2023). Kondisi ini mencerminkan warisan paradigma lama dimana kekuatan pertahanan diukur dari jumlah personel, bukan dari kapabilitas dan teknologi yang dimiliki.

Perbandingan dengan negara maju menunjukkan bahwa efektivitas pertahanan modern lebih ditentukan oleh kualitas alutsista, kemampuan teknologi, dan interoperabilitas sistem (Putra et al., 2025). Singapura dengan personel terbatas tetapi anggaran per personel tinggi mampu mencapai deterrent effect yang lebih kuat dibandingkan negara dengan personel besar tetapi anggaran per personel rendah.

Keterbatasan fiskal APBN yang tercermin dari defisit 2,5-3% PDB menciptakan kompetisi alokasi yang kompleks (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Mandatory spending untuk pendidikan (20% APBN) dan tekanan sektor kesehatan, infrastruktur, serta pemulihan ekonomi membatasi ruang ekspansi anggaran pertahanan secara drastis.

Namun, analisis ekonomi menunjukkan bahwa investasi pertahanan yang tepat dapat memberikan multiplier effect positif terhadap ekonomi domestik (Putra et al., 2025). Pengembangan industri pertahanan

dapat menciptakan nilai tambah ekonomi 1,5-2 kali lipat dari investasi awal melalui backward dan forward linkages dengan sektor lain (Sarjito, 2024).

Berdasarkan temuan empiris, strategi optimalisasi harus bersifat multi-dimensi dan bertahap. Dimensi pertama meliputi restrukturisasi komposisi belanja dengan target rasio 40:60 antara belanja rutin dan belanja modal (Wardhana & Soediantono, 2022). Implementasi ini dapat dilakukan melalui zero growth policy untuk personel TNI aktif sambil meningkatkan kualitas melalui pelatihan intensif dan pemanfaatan teknologi.

Dimensi kedua fokus pada diversifikasi sumber pendanaan melalui skema inovatif seperti obligasi pertahanan, Public-Private Partnership (PPP) untuk fasilitas pertahanan, dan kerjasama regional dalam pengembangan alutsista (Sarjito, 2024). Dimensi ketiga menekankan penguatan industri pertahanan domestik melalui kebijakan offset yang ketat dan alokasi khusus untuk R&D minimal 5% dari anggaran pertahanan (Montratama, 2014).

Dimensi keempat mengimplementasikan konsep smart defense melalui pooling & sharing dengan negara ASEAN, standarisasi alutsista untuk economies of scale, dan cost-sharing dalam proyek pengembangan teknologi militer regional (The Global Review, 2025). Simulasi implementasi strategi optimalisasi menunjukkan potensi peningkatan capaian MEF dari 65,06% menjadi 85-90% dalam periode 5 tahun tanpa meningkatkan proporsi anggaran terhadap PDB secara signifikan (InfoPublik, 2024). Penghematan dari restrukturisasi personel dapat dialokasikan untuk modernisasi alutsista dan pengembangan kapabilitas teknologi.

Penguatan industri pertahanan domestik diproyeksikan dapat mengurangi ketergantungan impor dari 70-80% menjadi 40-50% dalam jangka menengah, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi domestik (Rohmad & Susilo, 2022). Implementasi komponen cadangan dapat mengurangi biaya belanja pegawai hingga 15-20% sambil meningkatkan kapasitas mobilisasi dalam situasi darurat.

3.3. Kaitan dengan Tujuan Penelitian

Tujuan pertama penelitian untuk menganalisis kondisi dan struktur anggaran pertahanan Indonesia telah tercapai melalui identifikasi komprehensif terhadap tren anggaran 2020-2025, struktur belanja yang timpang, dan capaian MEF yang suboptimal (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Temuan menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan nominal anggaran, efisiensi dan efektivitas alokasi masih memerlukan perbaikan fundamental.

Analisis komparatif regional memberikan perspektif benchmarking yang menunjukkan posisi relatif Indonesia dan pembelajaran best practices dari negara tetangga (Stockholm International Peace Research Institute, 2024). Rasio anggaran per personel yang rendah dan ketidakseimbangan struktur belanja menjadi temuan kunci yang menjelaskan gap antara investasi dan output pertahanan.

Tujuan kedua untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang telah terpenuhi melalui analisis multidimensional terhadap kendala fiskal, ketergantungan impor, dan kelemahan industri pertahanan domestik (Badan Keahlian DPR RI, 2020). Sebaliknya, peluang strategis melalui pengembangan industri domestik, implementasi komponen cadangan, dan kerjasama regional telah teridentifikasi sebagai solusi potensial (Sarjito, 2024).

Temuan menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada keterbatasan anggaran semata, tetapi pada ketidakefisienan alokasi dan struktur belanja yang tidak optimal (Avisha et al., 2023). Peluang untuk mengoptimalkan existing resources melalui restrukturisasi komposisi belanja memberikan ruang perbaikan signifikan tanpa menambah beban fiskal.

Tujuan ketiga untuk merumuskan strategi optimalisasi komprehensif telah tercapai melalui pengembangan framework multi-dimensi yang mencakup aspek struktural, finansial, industrial, dan regional (Wardhana & Soediantono, 2022). Strategi yang dirumuskan bersifat implementatif dengan timeline yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur. Integrasi antara restrukturisasi belanja, penguatan industri domestik, diversifikasi pendanaan, dan kerjasama regional memberikan solusi holistik yang dapat mengatasi tantangan struktural sambil memanfaatkan peluang strategis yang tersedia (Syntax Literate, 2023).

Tujuan keempat untuk memberikan rekomendasi kebijakan telah terwujud melalui formulasi strategi bertahap dengan prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang (InfoPublik, 2024). Rekomendasi yang dihasilkan bersifat actionable dan dapat diimplementasikan dalam konteks sistem politik dan ekonomi Indonesia.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori ekonomi pertahanan dengan mengintegrasikan prinsip efisiensi alokasi sumber daya dalam konteks keterbatasan fiskal negara berkembang (Putra et al., 2025). Framework yang dikembangkan dapat menjadi referensi untuk negara dengan karakteristik serupa dalam mengoptimalkan anggaran pertahanan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi anggaran pertahanan Indonesia di tengah keterbatasan APBN memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan efisiensi alokasi, diversifikasi pendanaan, dan penguatan industri dalam negeri. Pencapaian MEF yang optimal tidak hanya bergantung pada peningkatan nominal anggaran, tetapi lebih pada restrukturisasi komposisi belanja dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi pertahanan yang efisien (Wardhana & Soediantono, 2022).

Temuan utama menunjukkan bahwa ketidakseimbangan komposisi belanja dengan 51% untuk personel dan hanya 40% untuk modernisasi menjadi hambatan struktural utama dalam pencapaian MEF (Badan Keahlian DPR RI, 2020). Strategi restrukturisasi dengan target rasio 40:60 antara belanja rutin dan investasi dapat meningkatkan efektivitas anggaran pertahanan secara signifikan tanpa menambah beban fiskal negara.

Perbandingan regional mengungkap bahwa Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi anggaran pertahanan melalui pembelajaran dari best practices negara ASEAN lainnya, terutama dalam hal rasio anggaran per personel dan fokus pada kualitas daripada kuantitas (Stockholm International Peace Research Institute, 2024). Rasio USD 23.250 per personel Indonesia masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi struktur organisasi dan penerapan teknologi.

Strategi optimalisasi multi-dimensi yang direkomendasikan meliputi: restrukturisasi komposisi belanja, implementasi komponen cadangan, penguatan industri pertahanan domestik, dan penerapan smart defense regional (Syntax Literate, 2023). Implementasi konsisten strategi ini diproyeksikan dapat meningkatkan capaian MEF dari 65,06% menjadi 85-90% dalam periode 5 tahun sambil mengurangi ketergantungan impor dari 70-80% menjadi 40-50%.

Implikasi kebijakan menunjukkan perlunya reformasi struktural dalam pengelolaan anggaran pertahanan yang tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif, tetapi juga kualitas dan efisiensi (Putra et al., 2025). Penguatan industri pertahanan domestik dapat memberikan dampak ganda berupa penghematan devisa dan peningkatan kemampuan teknologi dalam negeri dengan multiplier effect 1,5-2 kali lipat investasi awal (Sarjito, 2024).

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori ekonomi pertahanan dengan mengintegrasikan prinsip efisiensi alokasi sumber daya dalam konteks keterbatasan fiskal negara berkembang. Framework multi-dimensi yang dikembangkan dapat menjadi referensi untuk negara dengan karakteristik serupa dalam mengoptimalkan anggaran pertahanan.

Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data sekunder yang tidak memberikan akses terhadap informasi operasional yang lebih detail. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris mengenai dampak implementasi strategi optimalisasi terhadap capaian MEF dan pertumbuhan industri pertahanan domestik, serta analisis cost-benefit dari berbagai alternatif strategi yang direkomendasikan.

Bibliografi

- Alif, T., & Jafar, R. (2024). Pertahanan ekonomi: Menelusuri hubungan antara anggaran pertahanan, impor alutsista, dan kurs di lima negara ASEAN. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 1(4), 241-256. <https://doi.org/10.61132/jies.v1i4.470>
- Avisha, F., Saputro, G. E., Prakoso, R. L. Y., Studi Ekonomi Pertahanan, P., Pertahanan Republik Indonesia, U., Bogor, K., & Jawa Barat, P. (2023). Analisis dampak anggaran pertahanan dimasa pandemi Covid 19 terhadap sistem pertahanan negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1892-1901.
- Badan Keahlian DPR RI. (2020). Analisis ringkas cepat: Optimalisasi anggaran pertahanan dalam menghadapi ancaman aktual dan potensial. DPR RI.
- CNBC Indonesia. (2024, Januari 8). Ganjar benar, kekuatan minimum TNI jauh di bawah target. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240108080743-128-503617/ganjar-benar-kekuatan-minimum-tni-jauh-di-bawah-target>

- CNBC Indonesia. (2025, Juli 2). NATO naikan anggaran pertahanan jadi 5% dari PDB, RI saja baru 1%. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250702075701-4-645463/nato-naikan-anggaran-pertahanan-jadi-5-dari-pdb-ri-saja-baru-1>
- Detik News. (2024, Januari 7). Dibahas di debat pilpres 2024, ini pengertian minimum essential force. <https://news.detik.com/pemilu/d-7130817/dibahas-di-debat-pilpres-2024-ini-pengertian-minimum-essential-force>
- Farhan, M. F., Nulhakim, F., Sulistiyo, H., Alrasyid, H., Soraya, N. A., & Ayu, K. (2023). Analisis strategi industri pertahanan dalam mendukung pertahanan negara. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 169-178.
- InfoPublik. (2024, Agustus 30). Kemenko polhukam matangkan strategi pertahanan untuk RPJMN 2025-2029 dengan MEF sebagai tolok ukur. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/865721/kemenko-polhukam-matangkan-strategi-pertahanan-untuk-rpjm-2025-2029-dengan-mef-sebagai-tolok-ukur>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Kemenkeu RI.
- Montratama, I. (2014). Strategi optimalisasi pengadaan sarana pertahanan bagi industri pertahanan Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, 4(2), 71-92.
- Putra, F. A., Sundari, S., & Suwito, S. (2025). Peran ekonomi pertahanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 4(1), 24-39. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v4i1.288>
- Rohmad, R., & Susilo, E. (2022). Kemandirian industri pertahanan dalam mewujudkan investasi pertahanan. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(9), 3870-3876. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.985>
- Sarjito, A. (2024). Model ekosistem pertahanan negara berbasis kolaborasi pemerintah, industri dan masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 127-139. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v8i1.32134>
- Stockholm International Peace Research Institute. (2024). SIPRI military expenditure database. SIPRI. <https://www.sipri.org/databases/milex>
- Syntax Literate. (2023). Strategi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman militer dan non militer melalui perspektif ekonomi pertahanan. *Syntax Literate*, 8(7), 4813-4825.
- The Global Review. (2025, Maret 7). Peningkatan anggaran pertahanan-militer NATO untuk memperluas ekspansinya ke Asia Pasifik. <https://theglobal-review.com/peningkatan-anggaran-pertahanan-militer-nato-untuk-memperluas-ekspansinya-ke-asia-pasifik/>
- Universitas Pertahanan Republik Indonesia. (2019, Desember 5). Unhan gelar pelatihan tentang metodologi penelitian kualitatif guna memperluas horizon pengetahuan ilmu pertahanan. <https://www.idu.ac.id/berita/unhan-gelar-studi-penelitian-kualitatif-guna-memperluas-horizon-pengetahuan-ilmu-pertahanan.html>
- Wardhana, M. A., & Soediantono, D. (2022). Analisis strategi pemberdayaan industri pertahanan nasional dalam mendukung terwujudnya minimum essential force. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(5), 89-104. <https://doi.org/10.7777/jiemar>